

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji latar belakang kerja sama keamanan Jepang dan Filipina di era pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida melalui Reciprocal Access Agreement (RAA). RAA merupakan perjanjian pertahanan bilateral yang ditandatangani pada 8 Juli 2024 di Manila, menjadikan Filipina sebagai negara Asia pertama yang memiliki perjanjian akses timbal balik pertahanan dengan Jepang. Perjanjian ini mengatur kerangka hukum yang komprehensif mencakup mobilitas pasukan, penggunaan fasilitas militer, yurisdiksi hukum personel, serta mekanisme koordinasi operasional antara Self-Defense Forces Jepang dan Armed Forces of the Philippines. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Kerangka analisis yang digunakan adalah Teori Balance of Threat dari Stephen M. Walt dengan empat indikator utama yaitu kekuatan agregat, kedekatan geografis, kapabilitas ofensif, dan niat agresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terbentuknya RAA berakar dari meningkatnya persepsi ancaman bersama Jepang dan Filipina terhadap Tiongkok. Pertama, kekuatan agregat Tiongkok yang ditopang anggaran militer sebesar USD 314 miliar pada 2024 mengubah keseimbangan kekuatan regional secara fundamental. Kedua, kedekatan geografis kedua negara dengan wilayah proyeksi kekuatan Tiongkok di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan meningkatkan kerentanan strategis secara struktural. Ketiga, kapabilitas ofensif Tiongkok melalui strategi Anti-Access/Area Denial serta aktivitas zona abu-abu yang melibatkan China Coast Guard dan milisi maritim menciptakan tekanan koersif yang berkelanjutan. Keempat, niat agresif Tiongkok yang terefleksi dalam berbagai insiden maritim mendorong konvergensi persepsi ancaman kedua negara. Keempat faktor tersebut secara bersama-sama melatarbelakangi Jepang dan Filipina untuk menginstitutionalisasikan kerja sama keamanan mereka melalui RAA sebagai instrumen penyeimbang kolektif di kawasan Indo-Pasifik.

Kata Kunci : Reciprocal Access Agreement, Kerja Sama Keamanan, Jepang, Filipina, Balance of Threat.

ABSTRACT

This study examines the background of the Japan-Philippines security cooperation under Prime Minister Fumio Kishida's administration through the Reciprocal Access Agreement (RAA). The RAA is a bilateral defense agreement signed on July 8, 2024, in Manila, making the Philippines the first Asian country to establish a reciprocal access defense agreement with Japan. The agreement sets out a comprehensive legal framework covering troop mobility, use of military facilities, jurisdiction over personnel, and operational coordination between Japan's Self-Defense Forces and the Armed Forces of the Philippines. This study employs a qualitative-descriptive method with data collected through library research. The analytical framework applied is Stephen M. Walt's Balance of Threat Theory, with four main indicators: aggregate power, geographic proximity, offensive capabilities, and aggressive intentions. The findings reveal that the RAA's formation is rooted in the growing shared threat perception of Japan and the Philippines toward China. First, China's aggregate power, supported by a military budget of USD 314 billion in 2024, has fundamentally altered the regional balance of power. Second, the geographic proximity of both countries to China's power projection areas in the East China Sea and South China Sea has structurally increased their strategic vulnerability. Third, China's offensive capabilities through its Anti-Access/Area Denial strategy and grey zone activities involving the China Coast Guard and maritime militia have created sustained coercive pressure. Fourth, China's aggressive intentions reflected in various maritime incidents have driven the convergence of threat perception between both countries. These four factors collectively motivated Japan and the Philippines to institutionalize their security cooperation through the RAA as a collective balancing instrument in the Indo-Pacific region.

Keywords: *Reciprocal Access Agreement, Security Cooperation, Japan, Philippines, Balance of Threat.*